

PRAKTEK PRODUKSI HEGEMONI MILITER MELALUI FILM “JENDERAL SOEDIRMAN”

Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Terhadap Film “Jendral Soedirman”

Cosmas Gatot Haryono

Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia
Alamat surel: cosgathar@gmail.com

Abstract:

As a mass media, Film seldom unrecognized as a media disseminator for messages and discourse. This condition is used by filmmakers and some interested parties as “arena” to disseminate or conduct hegemony to the public. Film General Soedirman is one example of a film that we can felt the hegemony agenda. As a historical film, the film try to build its story or narrative centrally on the figure of the Great Commander General Soedirman. Interestingly, the protrusion of General Soedirman figure is felt too much. On the contrary, the civil politicians are discribed ugly. This led to controversy and debate that is quite exciting in the national media. There is a suspicion of a large discourse, that is being rolled out by the filmmakers for the sake of a certain position within the larger narrative of the republic.

This article is a report of qualitative research and use critical discourse analysis of Van Dijk. The research try to dismantle the structure of the text, either micro, macro, and it’s superstructure, thus unfolding discourse developed through the production of this film.

Keywords: *Critical Discourse, Text Structure, and Hegemony*

Abstrak

Film merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang sangat jarang disadari perannya sebagai media penyebar pesan dan wacana. Ketidaksadaran penonton ini menjadi arena bagi pembuat film dan beberapa pihak yang berkepentingan untuk menyebarkan atau melakukan hegemoni kepada masyarakat. Film Jenderal Soedirman adalah salah satu contoh film yang sangat terasa aroma hegemoni-nya. Sebagai film sejarah, film ini mencoba membangun cerita atau narasi-nya secara tersentral pada sosok Panglima Besar Jendral Soedirman. Yang menarik, penonjolan sosok, yang sebenarnya biasa dalam sebuah perfilman, dilakukan dengan secara “sewenang-wenang” dengan menjatuhkan tokoh perjuangan lain. Kesewang-wenangan inilah yang kemudian memunculkan kontroversi dan perdebatan yang cukup seru di media-media nasional. Ada kecurigaan sebuah wacana besar sedang digulirkan oleh pembuat film demi posisi tertentu dalam narasi besar republik ini. Peneliti meneliti film ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan model yang dikembangkan oleh Van Dijk. Peneliti berharap bisa membongkar struktur teks, baik mikro, makro, maupun superstrukturnya sehingga terkuak wacana yang dikembangkan melalui produksi film ini.

Kata Kunci: **Wacana Kritis, Struktur teks, dan Hegemoni**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 2015, dunia film Indonesia yang didominasi dengan tema hantu dan percintaan, dikejutkan dengan munculnya film dengan tema perjuangan, yaitu film Jenderal Soedirman. Film yang diproduksi Sekar Ayu Asmara dari Padma Pictures dan disutradarai Viva Westi ini diproduksi selama 43 hari dan menghabiskan biaya pembuatan berkisar antara Rp 10-15 miliar. Film tersebut menceritakan masa gerilya Soedirman selama tujuh bulan setelah agresi militer

Belanda ke Yogyakarta, 19 Desember 1948. Kesederhanaan dan keteguhan seorang Jenderal Soedirman dalam memegang prinsip menjadi isu utama yang menonjol dalam film ini. Digambarkan bagaimana Soedirman mengorbankan hartanya, seperti perhiasan istrinya, untuk bekal semasa bergerilya.

Bagi peneliti keberadaan film ini sangat menarik. Bukan saja pada kisah sejarah yang dimunculkan, tetapi juga pada aspek kontroversi yang melingkupinya. Sejak kemunculannya, film berjudul “Jendral Soedirman” memunculkan kontroversi di kalangan sejarawan

Indonesia. Banyak yang menyukainya, namun tidak sedikit pula yang mencerca atau bahkan menganggapnya terlalu berlebihan menampilkan sosok Soedirman. Peran militer dan “kekuasaan” militer digambarkan secara menonjol sehingga terkesan “mengangkangi” peran pejuang-pejuang sipil (Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain). Militer digambarkan begitu dominan memperjuangkan kemerdekaan, sementara para pejuang sipil seakan hanya menjadi kolaborator asing yang berusaha menjajah kembali Indonesia.

Film ini dianggap terlalu “merendahkan” atau “melemahkan” peranan tokoh bangsa yang lain. Digambarkan keputusan Soekarno dan jajaran kabinet untuk tetap bertahan di Yogyakarta ketika aksi militer Belanda ke-2 (19 Desember 1948), dianggap sebagai pengkhianatan perjuangan. Perbedaan sikap dan inkonsistensi Soekarno terasa sangat ditonjolkan dalam film ini, terutama karena mengingat sebelumnya Soekarno pernah berpidato bahwa ia akan melawan Belanda dengan ikut bergerilya bersama rakyat.

Sebagai media, film tentu bukanlah sebuah pesan yang bebas nilai. Sebagai bagian dari media massa, film tidak lepas dari kepentingan dan agenda pembuatnya. Salah satu kepentingan yang menurut peneliti menarik untuk diteliti adalah bagaimana produksi hegemoni dilakukan oleh kalangan militer dalam film tersebut.

Gagasan Tentang Hegemoni

Hegemoni dimaknai Gramsci sebagai sebuah strategi menuju perubahan sosial. Konsep ini muncul dalam rangka mengoreksi kegagalan revolusi sosialisme di negara-negara Barat, termasuk Italia, sekaligus mengevaluasi gagasan dasar Marxisme ortodoks paska Marx dan Engel yang memprediksikan kehancuran kapitalis sebagai akibat dari kontradiksi-kontradiksi internalnya dan akan digantikan dengan masyarakat sosialis melalui revolusi proletariat. Bagi Gramsci, revolusi adalah proses organik yang memerlukan pengorganisasian aktifitas sadar dan kesadaran kritis teoritis. Diperlukan persiapan intelektual, budaya dan politik kelas pekerja untuk suksesnya sebuah

revolusi proletariat. Di sinilah hegemoni menemukan lokus urgensinya.

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk mempercepat revolusi sosialis dalam rangka menghancurkan tatanan dan sistem kapitalisme. Di awal, Gramsci menggunakan istilah ini sebagai konsep yang netral, tidak bersifat baik atau buruk. Artinya, dia menggunakan konsep hegemoni dalam kerangka realitas perjuangan kelas dalam suatu tatanan masyarakat.

Gramsci mengidentifikasi hegemoni sebagai bentuk kontrol terhadap kehidupan intelektual masyarakat melalui sarana-sarana kebudayaan (Leszek Kolakowski, 1978: 242). Meskipun demikian, kadang kala hegemoni dilakukan dengan menyertakan kekuatan politik yang dijalankan dengan paksaan. James Joll (1977: 99) secara gamblang menjelaskan bahwa hegemoni suatu kelas politis berarti bahwa kelas tersebut berhasil membujuk kelas-kelas sosial lain untuk menerima nilai-nilai budaya, politik, dan moral dari kelas itu. Oleh karena itu hegemoni lebih terkait dengan upaya mencapai kekuasaan politik melalui konsensus antar kelas daripada melalui kekerasan. Bahkan dalam suatu hegemoni yang berhasil, kekuatan koersif sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kelas berkuasa.

Wacana Kritis Model Van Dijk

Analisis Wacana Kritis merupakan pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistik diskursif, makna bersifat historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial (Jorgensen dan Phillips, 2007). Analisis ini mengambil posisi non-konformis atau melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Bagaimana sebuah teks diproduksi sangat penting untuk dilihat. Proses produksi teks selalu melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Teks dibentuk dalam suatu praktik diskursus, yaitu praktik wacana. Di sini ada

dua bagian, yaitu teks yang mikro yang merepresentasikan suatu topik permasalahan dalam berita, dan elemen besar berupa struktur sosial.

Van Dijk membuat suatu jembatan yang menghubungkan elemen besar berupa struktur sosial tersebut dengan elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan kognisi sosial. Kognisi sosial sendiri mempunyai dua arti. Di satu sisi ia menunjukkan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh media, di sisi lain ia menggambarkan nilai-nilai masyarakat itu menyebar dan diserap oleh komunikator dan akhirnya digunakan untuk membangun teks (Eriyanto 2001:222). Struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/ pikiran dan kesadaran sangat berperan dalam membentuk dan berpengaruh terhadap teks media.

Pada dasarnya wacana mempunyai tiga dimensi/ bangunan, yaitu: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang pertama,

yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks media yang melibatkan kognisi individu pembuat teks media tersebut. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Ketiga dimensi ini merupakan bagian yang integral dan dilakukan secara bersama-sama dalam analisis Van Dijk (Eriyanto 2001:225).

Van Dijk (1985) membagi struktur teks ke dalam tiga tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. *Struktur makro* merupakan makna umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. *Superstruktur* merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka atau skema suatu teks dan bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Sedangkan *struktur mikro* adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, parafrase dan lain-lain.

<p>Struktur Makro Makna global dari suatu teks yang dapat diamati Dari topic/tema yang diangkat oleh suatu teks</p>
<p>Superstruktur Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, Isi, penutup, dan kesimpulan</p>
<p>Struktur Mikro Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati Dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks</p>

Sumber: Van Dijk, Teun A. 2000. *Discourse Ideology and Context*. London: SAGE Publications

Gambar 1. Struktur Teks Dalam Analisis Wacana Kritis Van Dijk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Analisis *Critical Discourse Study* (Van Dijk) Pada Film Jendral Soedirman

Analisis Konteks

Film ini menggambarkan dengan jelas konteks historisnya, yaitu bagaimana perjuangan TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dari kekuasaan penjajah Belanda. Sutradara mengambil peristiwa Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: *Operatie Kraal*) yang terjadi pada 19 Desember 1948 sebagai latar film ini. Serangan tersebut diawali dengan serangan terhadap ibukota Indonesia yang sedang dipindahkan ke Yogyakarta. Serangan ini disertai dengan penangkapan para pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya yang kemudian dibuang ke Bangka. Namun sebelum ditangkap, Soekarno sempat membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Dalam sidang kilat, Kabinet RI mengambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal di dalam kota dengan tujuan tetap dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak diplomatik tetap dapat dilangsungkan. Sebaliknya, Soedirman dan TNI mengambil keputusan untuk bergerilya meninggalkan ibukota Yogyakarta untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bahkan dalam film ini, Soedirman sebagai wakil TNI digambarkan "menuntut" janji Soekarno dalam pidato nya terdahulu yang berjanji akan selalu bersama rakyat Indonesia.

Bentuk relasi yang menonjol dalam film ini adalah munculnya dikotomi antara sipil dan militer (TNI). Dikotomi ini dipertegas dengan cuplikan dialog Jendral Soedirman dengan Presiden Soekarno paska Sidang Kabinet kilat yang terjadi di pendopo Gedung Agung Yogyakarta, dimana Soedirman meminta dengan sangat agar Soekarno bersedia ikut bersamanya bergerilya bersama TNI dan rakyat. Tapi Soekarno menolak dengan mendudukan siapa pada posisi apa dan seharusnya bagaimana. Presiden Soekarno menegaskan

bahwa Panglima TNI adalah tentara atau prajurit dimana medan pertempuran adalah tempat yang memang layak untuknya. Sedangkan Soekarno sebagai presiden tidak bisa bergabung dengan tentara di medan perang. Sebagai presiden, Soekarno harus tetap di ibu kota. Penegasan Soekarno ini seakan menegaskan perbedaan kewenangan dan tanggungjawab antara militer dan sipil. Sutradara seakan mau menegaskan dikotomi militer versus sipil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan peran komunikatif yang dimunculkan dalam film tersebut, ditunjukkan bahwa militer berperan sangat aktif dalam menggalang dukungan masyarakat untuk berperang. Latihan-latihan militer yang melibatkan pemuda dari berbagai desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta cukup menonjol dalam film ini. Sosok fiksi semacam Karsani (diperankan oleh Gogot Suryanto) membuat adegan-adegan latihan militer menjadi lebih "menarik". Sosok Karsani mewakili ribuan masyarakat awam yang dengan sukarela mengorbankan jiwa raga demi mempertahankan kemerdekaan. Itu terjadi karena pendekatan TNI kepada masyarakat.

Sebaliknya, ada pihak lain (politisi sipil) di era perjuangan ini yang digambarkan tidak pernah berjuang mengangkat senjata melawan penjajahan namun justru gemar berunding dan selalu sibuk saling jegal untuk memerintah. Hal ini terlihat nyata dalam adegan kemarahan Jendral Soedirman sebagai reaksi dari informasi tentang hasil perundingan Roem-Royen yang didengarnya dari radio bersama pejuang lainnya. Soedirman begitu emosi dengan menyebut perundingan tersebut sebagai bentuk kekonyolan pemerintah.

"sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang di republik ini masih ada dan kuat, dengan konyol pemerintah malah berunding...."

Dalam banyak kesempatan Soedirman kelihatan begitu terpukul oleh sikap politisi sipil yang memerintah Republik. Ia menyebut mereka sebagai pengkhianat karena mau berunding dengan Belanda. Bahkan Soekarno pun dianggapnya

sebagai bagian dari politisi sipil pengkhianat. Saat Soedirman dipanggil dari hutan untuk menghadap Presiden ke istana Yogyakarta, ia berujar:

“siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat dan telah ditawan oleh Belanda.....?”

Analisis Makrostruktur Semantik

Analisis makrostruktur Semantik mendasarkan diri pada analisis tentang topik sentral atau utama yang diangkat sebagai roh yang menghidupkan cerita dan fokus utama yang coba disuarakan dalam topik sentral tersebut (Van Dijk, 2009). Dalam film ini, topik sentral nya adalah peran Jendral Soedirman dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sedangkan isi model mental yang tampak dalam film ini secara garis besar dapat dilihat bahwa film ini melakukan penonjolan peran militer dan “kekuasaan” militer dengan “mengangkangi” peran pejuang-pejuang sipil (Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain). Soekarno-Hatta digambarkan sebagai politisi sipil yang gemar ingkar janji dan hanya mengutamakan citra di depan rakyat. Dalam salah satu adegan akhir film, saat Soedirman kembali ke Yogyakarta dan disambut soekarno-Hatta, Soekarno sempat meminta fotografer istana untuk memotret kembali adegan Soekarno memeluk Soedirman. Lepas dari benar-tidaknya peristiwa tersebut, adegan ini menggambarkan betapa Soekarno sebagai representasi politisi sipil haus akan popularitas atau dalam wacana politik terkini, Soekarno terjangkiti “virus pencitraan” yang melekat pada karakteristik politisi sipil.

Pemaknaan Lokal

Pemaknaan lokal terhadap film Jendral Soedirman ini dilakukan dengan menganalisis perbendaharaan kata yang digunakan. Pertama, dalam percakapan Soedirman dengan Tan Malaka tentang dukungan tentara kepada pemerintah RI. Soedirman mengungkapkan:

“Saya tentara, saya membela pemerintah untuk merdeka seratus persen... jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan”

Dalam kalimat tersebut Soedirman memilih kata “saya tentara” yang ingin menonjolkan bahwa dirinya adalah prajurit, representasi dari kalangan militer di Indonesia yang mengangkat senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soedirman juga menggunakan istilah “merdeka seratus persen”. Soedirman menegaskan bahwa merdeka yang dicita-citakan militer adalah merdeka yang benar-benar atau sesungguhnya dan tidak ada kompromi atau mengakomodasi pihak lain yang pada akhirnya justru mengurangi kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini tentu berseberangan dengan kemerdekaan yang kemudian dihasilkan oleh para pejuang sipil yang berjuang melalui jalur diplomasi.

Jenderal Soedirman juga mengatakan akan “membela pemerintah” dalam rangka memewujudkan kemerdekaan yang seratus persen tersebut. Maka dalam dialog-dialog lain dalam film ini, berulang kali Soedirman tampak marah dan tidak suka dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah ketika memutuskan untuk berdiplomasi dengan Belanda.

Soedirman juga mempersalahkan Tan Malaka jika mempunyai rencana lain. Di sini, terlihat bahwa Soedirman menangkap ada cara-cara yang ditempuh Tan Malaka yang tidak sesuai dengan ideologi maupun nilai-nilai yang dipegang teguh militer Indonesia. Menarik untuk melihat cuplikan adegan-adegan tentang sosok Tan Malaka. Dalam beberapa penggal cerita, Tan Malaka ditokohkan sebagai contoh politisi yang rakus akan kekuasaan. Golongan kiri yang setiap saat mengancam pemerintah dan perjuangan kemerdekaan. Selain menampilkan Tan Malaka sedang berpidato dengan latar belakang spanduk yang bergambar palu arit, kamera juga menyoroti brosur yang bertulisan "Tan Malaka Presiden Kita". Penggambaran tentang Tan Malaka diakhiri dengan penangkapan dirinya bersama beberapa orang lain diseret dengan tangan terikat tali di dalam hutan. Dilaporkan bahwa Tan Malaka dan pengikutnya ditangkap atas perintah Soekono. Kemudian terdengar tembakan dor-dor. Meskipun sebenarnya tidak ada perintah penangkapan terhadap

Tan Malaka, walaupun ia memilih bergerilya di Jawa Timur.

Dalam adegan yang lain, Jendral Soedirman berkesempatan bertemu dengan Soekarno di saat genting ketika Belanda menyerang Pangkalan Angkatan Udara TNI Maguwo. Ia menolak ajakan presiden agar Soedirman yang sedang sakit tetap tinggal di kota bersama pemimpin pemerintahan yang lainnya. Ia justru memohon agar Presiden Soekarno ikut bersamanya bergerilya.

Soedirman: *“Dan kami memohon dengan sangat, agar Pak Presiden keluar dari kota dan masuk hutan sesuai rencana Pak... ikutlah bergerilya bersama kami Pak..”*

Soekarno: *“Dimas..., Engkau Seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran... bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tetap tinggal di sini...!!”*

Dialog ini sekilas seperti sebuah dialog biasa yang berupa ajakan Soedirman sebagai Panglima TNI kepada Presiden untuk bergerilya daripada menyerah dan menjadi tawanan Belanda. Permintaan Soedirman ini menjadi tidak biasa kalau dikaitkan dengan konteks waktu sebelumnya, dimana Presiden pernah berpidato bahwa ia akan melawan Belanda dengan ikut bergerilya. Ternyata, ketika tiba waktunya, presiden Soekarno ingkar janji. Kata *“sesuai rencana”* menegaskan bahwa sebelumnya keterlibatan Soekarno dalam gerilya sudah direncanakan bersama. Sutradara sepertinya mau mengatakan bahwa Soekarno dan Soedirman sepakat untuk bersama-sama berjuang dengan bergerilya ketika ibukota diserang Belanda. Adegan ini tak ubahnya sebuah penagihan janji yang kemudian tidak dikabulkan.

Bahkan Soekarno memberikan argumen bahwa seorang prajurit memang tempatnya di medan perang. Sedangkan Soekarno bukan prajurit maka tidak perlu ke medan perang. Argumen Soekarno ini seperti memberikan dikotomi militer dan sipil berikut kewajiban yang melekat dalam

diri mereka. Seakan yang boleh berperang hanya militer saja dan sipil tidak perlu berperang atau memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam adegan-adegan selanjutnya terus muncul persoalan ingkar janji bahkan penghianatan yang dilakukan oleh presiden Sukarno. Padahal bila dicermati, keputusan untuk bertahan di Yogyakarta bukan keputusan individu Soekarno; melainkan hasil rapat kilat Kabinet. Ada wacana merendahkan peran politikus sipil khususnya Soekarno dalam adegan dialog ini. Seakan di saat genting dan butuh pengorbanan, Soekarno enggan melakukannya dan lebih suka tetap tinggal di istana.

Dalam adegan beredarnya buku *“Perjuangan Kita”* karya Sutan Syahrir tentang halangan reformasi birokrasi karena banyak kepemimpinan nasional diisi oleh bekas pembatu dan pegawai Jepang, Soedirman mengancam akan melakukan pengambilalihan kebijakan sendiri. Ini berkaitan juga dengan diplomasi yang menurutnya justru memecah belah bangsa.

“Jika diplomasi yang dilakukan justru membuat kita terpecah belah, saya tidak akan segan-segan untuk mengambil alih kebijakan sendiri”

Soedirman juga menunjukkan sikapnya yang sederhana dan tidak mau merepotkan orang. Ia tidak mau diperlakukan sebagai seorang pimpinan yang diagung-agungkan bak seorang raja. Meskipun kondisinya tidak sehat, ia ingin diperlakukan sebagaimana biasanya, tidak berlebihan. Kesan ini muncul dalam percakapannya dengan Noly (Tjokropranolo) tentang tandu yang dibuatnya untuk Sang Jederal selama gerilya.

“Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noly..”

Meskipun pecakapan ini singkat, namun maknanya mendalam. Selain pesan kesederhanaan, percakapan ini begitu menohok perilaku pimpinan dari kalangan sipil yang berperilaku sok penguasa bahkan mensejajarkan diri seperti seorang raja yang minta dilayani dan *“ditinggikan”* di manapun juga. Meskipun akhirnya

menerima, sikap yang dipertontonkan oleh Soedirman menunjukkan bahwa karakter militer berbeda dengan sipil.

Pada bagian lain dari film ini, terdapat adegan monolog Soedirman yang jengkel dan marah terhadap hasil perundingan Roem Royen. Soedirman menumpahkan kekesalannya dengan membanting tongkat komando yang selalu dibawanya di hadapan para pengikut setianya. Ia merasa dikhianati dan tidak dihargai kehormatannya sebagai tentara.

“Perdamaian apa? Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang, sementara kita membuktikan bahwa tentara di republik ini masih ada dan kuat..., dengan konyol pemerintah malah berunding..... dengan berunding sama saja kita menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib..., tidak aman... dan sudah jelas mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka... kita ini tentara...!! kita punya martabat...!! kita tidak aka tinggal diam sampai kapanpun”

Soedirman sangat tersinggung dan marah dengan hasil perjanjian Roem-Royen ini. Bahkan ia mempertanyakan perdamaian apa yang berhasil diciptakan oleh perundingan itu. Soedirman melihat sikap politisi sipil pimpinan Soekarno yang memilih jalur diplomasi sama saja menggadaikan dan tidak perjuangan yang sedang dilakukan oleh militer. Baginya, Belanda adalah pembuat kekacauan dan perusak kedamaian yang sudah terjadi di Indonesia. Ia tidak rela militer dianggap tidak lebih dari gerombolan bersenjata yang tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap keberlangsungan republik. Dalam perundingan, militer tidak dilibatkan sama sekali dan terasa bahwa mereka berada dibawah kekuasaan kaum politisi sipil yang berdiplomasi. Padahal faktanya, saat ini mereka berjuang menyambung nyawa demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Ketidakpuasan Soedirman ini diwujudkan dengan penolakan dia dan pasukannya untuk kembali ke Yogyakarta.

Bahkan mereka tetap melanjutkan perang gerilya menyerang pos-pos Belanda yang mereka lalui.

Monolog sendiri sebenarnya merupakan percakapan tunggal oleh seorang tokoh untuk dirinya sendiri yang berfungsi untuk menegaskan keinginan ataupun harapan dari tokoh tersebut terhadap sesuatu. Dalam hal ini, Soedirman tampak emosional dalam melakukan monolog dengan suara yang lantang. Prajurit yang disekitarnya tampak merasakan emosi yang sama dengan Sang Jenderal. Maka, seolah monolog itu adalah monolog dari semua prajurit yang saat itu sedang berjuang bersama Soedirman dengan bergerilya. Mereka merasakan emosi yang sama.

Dalam film ini juga terlihat penggunaan metafora untuk mengungkapkan suatu maksud. Misalnya, ketika bertemu dengan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta, Jenderal Soedirman mengatakan menyerahkan "pemerintahan militer" kepada pemerintahan Soekarno - Hatta. Namun pada teks bahasa Inggris tertulis *military command*, jadi jabatan sebagai pemimpin militer yang diserahkan. Meskipun mengundang banyak tanya, apakah pemeran Soedirman yang salah ucap atau ini memang disengaja? Tetapi penggunaan metafora "pemerintahan militer" memperlihatkan bahwa militer sebelumnya mempunyai sistem dan tatakelola pemerintahannya sendiri dan terpisah dari pemerintahan sipil. Ada kesan bahwa militer sedari awal tidak mau berada dibawah komando sipil. Penyerahan "pemerintahan sipil" menunjukkan bahwa militer akhirnya mau menyerahkan pengelolaan dan perintah atas dirinya dibawah presiden yang adalah politisi sipil.

Relevansi Struktur Formal Tersirat

Pada bagian ini peneliti berusaha melihat bentuk-bentuk linguistik yang biasanya tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pembicara atau penulis. Dengan demikian, peneliti mendapatkan gambaran tentang ciri-ciri pragmatis suatu peristiwa komunikasi seperti maksud, situasi emosi pembicara, perspektif, opini co-partisipan, dan kepedulian interaksional, presentasi positif tentang diri dan pembentukan kesan.

Bentuk linguistik yang tidak terkontrol yang tampak dalam film ini antara lain terlihat dalam adegan dimana Presiden dan Wakil Presiden yang mengakui bahwa beliau berbohong, berdosa, ingkar janji dengan tidak ikut ber-gerilya. Di situ presiden dan wakil presiden mengakui bahwa dirinya berbohong. Dalam buku sejarah manapun tidak pernah penulis jumpai hal yang demikian. Entah kesalahan atau sengaja memutar balik fakta, sepertinya penulis cerita dan sutradara tidak mampu mengontrol diri sehingga film ini tidak jauh masuk kepada hal-hal yang bisa menimbulkan kontroversi. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang sejarawanpun di Indonesia dan bahkan dunia yang menulis bahwa presiden dan wakil presiden RI mengakui bahwa mereka telah berbohong kepada rakyat terkait kesediaan mereka bergerilya bersama rakyat.

Pada adegan pertemuan Soedirman dan Presiden Soekarno sebelum rapat kabinet juga menunjukkan bentuk linguistik yang tidak terkontrol. Di situ Soedirman bersikeras bertahan di istana meski sakit untuk menunggu hasil sidang kabinet. Bahkan saat Presiden memaksanya untuk pulang saja, Soedirman tetap bertahan untuk menunggu hasil rapat kabinet. Akhirnya adegan diakhiri dengan kengototan Soedirman untuk tetap berperang, meskipun pemerintah memutuskan untuk tidak meninggalkan Yogyakarta.

Model Konteks

Dalam film ini model konteks dibangun melalui skema “pertentangan” atau “pendikotomian” yang sayangnya dibangun secara serampangan tanpa riset yang mendalam. Misalnya, penggambaran tentang tokoh Tan Malaka: Tan Malaka haus kekuasaan, sementara itu Soedirman menolak melawan negara. Diceritakan pula tentang tentara komunis yang tidak membayar makanan kepada pedagang asongan. Si ibu pedagang kecil itu ngamuk, “Tentara kok makan nggak bayar”. Selanjutnya, muncul tiga anggota tentara Soedirman yang diutus membeli keperluan harian ke kota, dan dengan baik hati, mereka mengganti makanan yang “dirampok” tentara komunis.

Untuk memperkuat pertentangan, disisipkan adegan seorang Tionghoa yang menjadi pemilik toko mengatakan bahwa tentara komunis itu mempunyai presiden sendiri. Sutradara melakukan penggambaran serampangan di lapangan antara tentara nasional pro-pemerintah dengan pasukan kemerdekaan yang -dianggap- komunis. Diantaranya melalui tokoh Soedirman, yang berkarakter sabar, kalem, berwibawa. Sebaliknya kesan agresif, radikal, jago pidato, dimunculkan lewat Tan Malaka. Kehadiran tentara rakyat yang komunis ditandai dengan pasukan bersenjata yang memakai “pita merah” di lengannya. Ini jelaslah mengundang tanda tanya besar, apakah benar fakta atau hanya imaginasi sutradara?

Model Peristiwa

Model peristiwa pada dasarnya merupakan semantik wacana. Biasanya semantik bahasa dirumuskan dalam kerangka makna yang abstrak dalam bentuk konsep, proposisi dan hubungan kesalingan. Dalam film ini perjuangan gerilya yang dilakukan Soedirman dan TNI merupakan bentuk perlawanan dari upaya penguasaan kembali wilayah Republik Indonesia yang sebenarnya sudah merdeka. Di sisi lain digambarkan pengakuan Soekarno-Hatta yang merasa seolah telah membohongi Soedirman dan Pasukannya karena sebelumnya berjanji akan bergerilya pun juga diperlihatkan. Padahal T.B. Simatupang yang waktu itu menjabat sebagai Penasihat dan Wakil Kepala Staf TNI menjelaskan bahwa sistuasinya tak memungkinkan jika Sukarno-Hatta ikut bergerilya. Butuh tambahan beberapa Batalyon untuk menjamin keselamatan Soekarno-Hatta jika ikut bergerilya.

Wacana ini secara koheren dikonstruksikan model mentalnya dengan penggunaan kata ingkar janji dan berkhianat. Model peristiwa perlu memperhitungkan fakta yang secara subyektif mereprenstasikan peristiwa-peristiwa yang diacu oleh wacana. Peristiwa penolakan Soekarno untuk bergerilya, gerakan-gerakan yang dilakukan Tan Malaka untuk mengganti pemerintahan yang belum bisa berdiri tegak, serta penghinaan

politisi sipil yang berunding dengan Belanda, menjadi peristiwa-peristiwa acuan bagi penciptaan wacana dalam film ini.

Analisis Kognisi Sosial

Dalam film ini ada banyak penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi serta reproduksi yang melibatkan kelompok. Setidaknya penyalahgunaan kekuasaan yang sangat kentara muncul dalam penghilangan tokoh-tokoh penting pelaku sejarah yang disinyalir karena alasan perbedaan ideologi mereka dengan ideologi militer saat ini yang anti komunis. Dalam film ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang “hilang” karena ia beraliran atau bersimpati pada partai komunis.

Misalnya, penghilangan tokoh Letkol Soeadi, pengawal pribadi Sang Jenderal (Hendi Jo, 2016). Sosoknya yang khas dengan baret hitam justru digantikan oleh Kapten Tjokropanolo alias Noly dari unsur Polisi Tentara (sekarang Polisi Militer) yang diperankan Ibnu Jamil. Letkol Soeadi sendiri adalah mantan komandan Komando Pasukan Panembahan Senopati (KPPS), simpatisan FDR PKI yang “dinetralisir” oleh Jenderal Soedirman dengan mengangkat Soeadi menjadi pengawal pribadinya. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa tokoh sepenting Soeadi “dihilangkan” dalam film ini? Jangan-jangan penghilangan peran dan jasa seseorang dalam sejarah terjadi karena dia mengikuti pilihan hidup atau garis politiknya.

Yang tak kalah menarik adalah minimnya peranan Lekol Soeharto dan Sultan Hamengku Buwana IX dalam film ini. Padahal, keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah pemerintahan darurat RI di Yogyakarta. Juga kesewenangan-anangan penulis naskah dalam menokohkan Tan Malaka sebagai “pejuang kiri” yang haus kekuasaan dan merongrong pemerintahan yang belum berdiri tegak.

Analisis Ideologi

Dalam film ini, sutradara secara gamblang mendikotomikan sipil dan militer sebagai dua entitas yang saling bertolak belakang. Dalam banyak adegan, militer digambarkan dengan nilai-nilai patriotisme

dan semangat juang yang tinggi. Militer adalah sekelompok patriot yang merelakan harta benda bahkan harus berpisah dengan keluarga yang dicintainya (adegan Soedirman meninggalkan istri dan anaknya untuk bergerilya) demi kemerdekaan yang 100 persen. Militer begitu dicintai oleh rakyat karena rakyat merasakan benar perjuangan mereka. Tentara selalu disambut dan dielu-elukan ketika keluar-masuk kampung selama bergerilya.

Sementara kalangan politisi sipil digambarkan sering bertikai dan berebut kekuasaan (kasus Tan Malaka) serta tidak mau bergabung dengan TNI dan rakyat untuk berperang secara gerilya melawan pemerintah Belanda. Politis sipil digambarkan sebagai sekelompok politisi yang mengambil keuntungan dalam setiap situasi dan mudah berkompromi dengan penjajah. Bahkan berkhianat disaat yang sangat menentukan. Sipil juga sering memecah belah dan membuat militer terpecah.

Film ini juga penuh dengan kebencian pada ideologi komunis. Gerakan kiri yang dipelopori oleh Tan Malaka bekerjasama dengan Mayor Sabaruddin di sekitar Madiun rupanya mengganggu kalangan militer. Keduanya mewakili musuh bersama militer, yaitu kaum komunis yang dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa pemberontakan Madiun yang menewaskan banyak sekali pejuang (TNI). Pada bagian akhir film ini digambarkan kejadian dimana Tan Malaka ditangkap dan ditembak mati oleh tentara Militer Divisi I Jawa Timur.

Analisis Situasi Masyarakat

Menurut Van Dijk (2009), analisis situasi masyarakat sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari konsep kognisi sosial karena teori kognisis sosial menjelaskan bagaimana struktur sosial berpengaruh atau dipengaruhi oleh wacana. Maka interaksi sosial lokal dimungkinkan oleh dimensi makro yang terungkap dalam kognisi sosial kolektivitas.

Dalam film ini ada banyak penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi serta reproduksi yang melibatkan kelompok militer demi mewacanakan peran besar militer dalam perjuangan kemerdekaan RI.

Penyalahgunaan kekuasaan yang sangat kentara muncul dalam penghilangan tokoh-tokoh penting pelaku sejarah (Letkol Soeadi, Letkol Soeharto, dan Hamengku Buwana IX) yang disinyalir karena alasan perbedaan ideologi mereka dengan ideologi militer saat ini yang anti komunis. Dalam film ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang “hilang” karena ia beraliran atau bersimpati pada partai komunis. Seperti telah dibahas dalam analisis kognisis sosial, Misalnya, penghilangan tokoh Letkol Soeadi, pengawal pribadi Sang Jenderal. Secara keseluruhan film ini sarat dengan wacana anti komunis yang bagi militer selalu menjadi musuh bebuyutan. Munculnya tentara komunis atau PKI di sekitar Kediri yang diproyeksikan sebagai pihak antagonis dalam film ini, menegaskan wacana tersebut.

Film ini dirilis pada 27 Agustus 2015, sekitar 18 tahun reformasi bergulir. Semenjak bergulirnya reformasi, kebebasan secara praktis diterapkan dalam semua aspek kehidupan di Indonesia. Informasi dan segala macam paham berkembang sangat pesat dan cepat di Indonesia. Perkembangan dan kebebasan akses terhadap informasi ini pun berakibat membawa keburukan bagi bangsa Indonesia juga. Nasionalisme mulai pudar, cinta tanah air mulai mengendur, integritas sosial menurun adalah kecenderungan umum yang terjadi di Indonesia.

Film ini sepertinya mencoba untuk memberikan hal lain yang mungkin tidak akan didapatkan secara langsung anak-anak muda zaman sekarang. Film ini menawarkan nilai-nilai patriotisme yang bisa digunakan sebagai pegangan hidup, mengingatkan kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. Tetapi secara bersamaan juga mengingatkan akan adanya faham-faham tertentu yang “dianggap membahayakan” bagi kehidupan bernegara, yaitu komunisme.

Analisis Tindakan Diskursif Sebagai Tindakan Sosial Politik

Untuk menganalisis tindakan diskursif dalam film ini, peneliti mencoba melihat dari wacana-wacana apa yang merepresentasikan tindakan politik dari Jenderal Soedirman. Peneliti juga akan melihat cara-cara atau tindakan dan struktur

wacana dijabarkan di dalam pengundangan atau manuver sosial-politik. Wacana yang pertama adalah wacana ketidaksetujuan Soedirman akan langkah diplomasi yang diambil para politisi sipil justru memecah belah bangsa Indonesia. Wacana ini diungkapkan Soedirman dalam percakapannya dengan Jenderal Oerip Soemohardjo menanggapi buku Sutan Syahrin yang mendeskreditkan para mantan pegawai Jepang yang sekarang duduk di pimpinan pemerintahan. Wacana berikutnya adalah kalangan politisi sipil merupakan sekelompok kepentingan yang sering bertikai dan suka berebut kekuasaan. Politisi sipil digambarkan sebagai sekelompok politisi yang mengambil keuntungan dalam setiap situasi. Bahkan berkhianat disaat yang sangat menentukan. Kelompok komunis dan Tan Malaka menjadi pihak yang paling disorot terkait dengan wacana ini. Para politisi sipil juga diwacanakan sebagai pihak yang sangat mudah berkompromi dengan penjajah, bahkan “tidak menghormati” yang benar-benar berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Analisis Pelaku

Semua partisipan, baik produser maupun penerima teks merupakan pihak yang menghubungkan tindakan wacana (pengingkaran) dengan tindakan sosial (diskriminasi). Secara lebih khusus, peneliti melihat bahwa pihak yang paling menentukan arah dan kemana alur cerita film berkembang adalah sutradara dan produsernya. Film yang disutradarai oleh Viva Westi ini diproduksi oleh Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan yayasan yang didirikan oleh para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Film ini juga melibatkan TNI dalam proses produksinya. Menurut Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syanakri yang juga menjadi *Associate Producer* dalam film ini, keterlibatan TNI dimulai sejak awal produksi. Mulai dari riset sejarah yang melibatkan Dinas Sejarah TNI AD, pembuatan skenario, hingga mendukung adegan-adegan dan persenjataan termasuk *tank* dan senapan kuno yang ada dalam film ini (<https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/keterlibatan-tni-ad-dalam-film-jenderal-soedirman>, diakses 8 Juni 2016).

Banyaknya keterlibatan TNI AD dalam pembuatan film, menjadi sebuah spekulasi kalau film Jenderal Soedirman merupakan film titipan TNI AD.

Analisis Struktur Masyarakat

Dengan melihat siapa yang memproduksi film ini, sebenarnya dengan mudah akan bisa memahami mengapa film yang disutradarai Viva Westi ini seakan berpihak pada tentara dan mengkritik bahkan menelanjangi kalangan politisi sipil. Bisa jadi ini merupakan kritik terhadap fakta struktur masyarakat terkini di Indonesia. Di era yang serba internet ini, banyak anak muda yang sangat sering menghabiskan waktunya di depan laptop atau Gadget untuk memuaskan keingintahuan mereka terhadap teknologi dan informasi dunia. Tapi tidak banyak yang tertantang untuk memahami lebih dalam tentang perjuangan para bapak bangsa yang telah merelakan harta dan nyawa demi kemerdekaan. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh *super hero* Hollywood yang lebih keren, macho dan kekinian.

Selain itu, kondisi kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara juga sedang diliputi kegelapan karena KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih saja terjadi di tanah air. Apa yang terjadi ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia memang sedang menyedihkan. Negara dipenuhi oleh para bandit berdasi yang melakukan korupsi berjamaah.

Produksi Hegemoni Militer Vs Politisi Sipil Dalam Film Jendral Soedirman

Produksi film ini merupakan bentuk kontrol terhadap kehidupan intelektual masyarakat saat ini yang coba dilakukan oleh produser. Film merupakan media yang saat ini dipahami sebagai salah satu dari sekian banyak sarana-sarana kebudayaan yang ada. Melalui produksi film ini, produser film (Yayasan Kartika Eka Paksi) mencoba mengontrol masyarakat agar tidak melupakan perjuangan militer berikut jasanya yang besar dan sekaligus menelanjangi kelakuan politisi sipil sejak zaman perjuangan.

Perubahan sosial politik baru bisa dimungkinkan jika masyarakat bawah

terlebih dahulu berhasil merebut hegemoni kultural dengan menyingkirkan hegemoni kaum borjuasi yang menindas. Dalam hal Indonesia, secara praktis militer berapi pada pihak kaum borjuasi yang mengendalikan republik pasca tumbanganya rezim orde lama. Soeharto dengan militer dan kroni pengusahanya menjadi pihak yang telah berhasil menghegemoni masyarakat menjadi masyarakat yang militeristik dengan pemerintahan yang cenderung otoriter. Selama orde baru, praktis militer menjadi pihak yang melakukan hegemoni terhadap masyarakat dan politisi sipil pada umumnya. Tidak ada jabatan politik di Indonesia selama pemerintahan Soeharto yang berasal dari sipil. Rata-rata mereka berlatar belakang militer. Mulai dari Bupati, Gubernur, Menteri, Wakil Presiden, hingga pimpinan DPR-MPR.

Reformasi 1998 telah berhasil merelokasi dan mereposisikan militer menjadi jauh dari kekuasaan dan politik. Reformasi berhasil meletakkan supremasi sipil atas militer yang selama 32 tahun sebelumnya (orde baru) sangat sulit dilakukan. Semua jabatan politik, bahkan untuk menjadi Presiden Indonesia pun terbuka bagi seluruh warga negara. Tidak ada lagi dominasi kaum militer. Tidak ada lagi gaya-gaya militeristik yang begitu dominan di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini, bagi sebagian kalangan militer merupakan bencana karena mereka harus meredefinisikan peran dan fungsi militer. Faktanya, militer menjadi alat pertahanan keamanan yang setiap saat harus siap sedia digunakan untuk melawan ancaman dari luar.

Militer tidak boleh lagi berkecimpung dalam kekuasaan dan perpolitikan nasional. Maka slogan “militer kembali ke barak” menjadi slogan yang sering terdengar selama era reformasi. Setelah kurang lebih 17 tahun tersisihkan, ada kesadaran dalam diri militer untuk mencoba mengingatkan kembali apakah benar militer harus tetap dan terus di barak? Mengingat dalam pemerintahan sipil sering terjadi “pertikaian” politik yang membuat kondisi tidak stabil.

Mereka yang tidak suka dengan kondisi ini mencoba mengembalikan peran

militer sebagaimana sebelum era reformasi. Pemerintahan di bawah politisi sipil cenderung labil dan tidak ada stabilitas politik yang dikhawatirkan justru memecah belah bangsa. Maka reposisi militer ke tengah-tengah kekuasaan dirasakan perlu oleh mereka. Untuk itu perlu dilakukan pengambilalihan pandangan masyarakat, nilai-nilai, dan harapan-harapan seluruh masyarakat atau paling tidak kelas-kelas penting dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, dalam rangka menciptakan sistem masyarakat yang baru itu diperlukan sebuah kebudayaan yang baru pula. Upaya pengambilalihan atau perebutan hegemoni inilah yang disebut Gramsci sebagai “perang posisi” (*war of position*).

Produksi Film Soedirman adalah bentuk dari upaya untuk meletakkan kembali posisi militer dalam kerangka pengelolaan negara. Maka disusunlah skenario yang banyak menyudutkan dan menelanjangi kelakuan politisi sipil dan menunjukkan betapa agung dan besarnya peranan kaum militer dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka rela mengorbankan segala yang dimilikinya demi perjuangan tersebut. Soedirman mengorbankan hartanya, seperti perhiasan istrinya, untuk bekal semasa bergerilya. Semua itu adalah nilai-luhur yang perlu diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

Menurut James Joll (1977: 99), Hegemoni lebih terkait dengan upaya mencapai kekuasaan politik melalui konsensus antar kelas daripada melalui kekerasan. Bahkan dalam suatu hegemoni yang berhasil, kekuatan koersif sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kelas berkuasa. Militer Indonesia (TNI) rupanya sadar bahwa mereka perlu melakukan kontrol dan mencapai kekuasaan politik tidak dengan unjuk kekuatan secara paksa (koersif). Film merupakan wahana atau media yang sesuai untuk melakukan pengontrolan terhadap konsensus antar pihak di Indonesia.

SIMPULAN

Sebenarnya film ini mempunyai pesan yang sangat mulia tentang kesederhanaan hidup dan keteguhan memegang prinsip seorang Jendral Besar Tentara Nasional Indonesia. Namun semestinya, penonjolan sikap mulia Soedirman, dilakukan tidak dengan melemahkan perjuangan tokoh bangsa yang lain (politisi sipil). Film ini merupakan bentuk nyata upaya melakukan perang posisi dalam rangka hegemoni militer dengan seperangkat ideologinya terhadap masyarakat sipil. Bagi militer, kondisi reformasi merupakan kondisi dimana mereka disingkirkan dan dipinggirkan. Mereka berada jauh dari kekuasaan dan politik. Dengan film ini, mereka berupaya menempatkan diri mereka kembali pada posisi semula (di masa orde baru). Bagaimanapun juga mereka tidak akan pernah merasa rela menjauh dari politik dan kekuasaan di negara ini karena mereka mempunyai “saham” yang besar selama revolusi fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, Cronin, *The Paradox of Hegemony: America's Ambiguous Relationship with the United Nations*, *European Journal of International Relations* March 2001 vol. 7 no. 1 103-130
- Dal Yong Jin, *Transforming the global film industries Horizontal integration and vertical concentration amid neoliberal globalization*, *SAGE Journals of International Communication Gazette*, August 2012 vol. 74 no. 5 405-422
- Danesi, Marcel, 2010. *Semiotika Media*, Yogyakarta: Jalasutra
- Dewi Savitri, *Kejahatan perang Oleh Jepang (Studi Kasus Terhadap Jugun-Ianfu Sebagai Hegemoni Kebudayaan Di Indonesia Periode 1942-1945)*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 284 – 295
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.

- Furchan Arief, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya
- Gramsci, 1987, *Selections From the Prison Notebooks*, New York: International Publisher
- Jesus Martin-Barbero, Communication, Culture and Hegemony: From the Media to the Mediations, *Canadian Journal of Communication*, Vol 19 No 3 1993
- Henink, Monique, etc. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications
- Jorgensen dan Phillips.2007. *Feminist Critical Discourse Analysis and Children's Fantasy Fiction*. Finland
- Littlejohn & Foss, 2008. *Theories of Human Communication*. Ninth Edition. Belmont-USA: Thomson Wadsworth
- McQuail, Dennis. 2005. *Mass Communication Theory*, Fifth Edition, London: SAGE Publications
- Michael Robert Evans, Hegemony and Discourse Negotiating Cultural Relationships Through Media Production, *SAGE Journal of Journalism*, December 2002, vol. 3 no. 3 309-329
- Naadiyah Azh Zhafirah, Film 'Senyap' Sebagai Media Counter Hegemony Bagi Rekonsiliasi Korban G30S, *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, Vol 3, No 03 2015
- Rekha Sharma, Desi Films: Articulating Images of South Asian Identity in a Global Communication Environment, *Global Media Journal*, 2011: Volume 4, No. 1, pp. 127-143
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Y3A, Malang
- Schiffrin, Deborah. 1994. *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Van, Dijk Teun A. 1993. *Principles of critical discourse analysis*. Discourse & Society London: SAGE Publications
- Van Dijk, Teun A. .2000. *Discourse Ideology and Context*. London: SAGE Publications